

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dalam upaya penanganan kasus TPPO yang melibatkan WNI sebagai korban yang dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan POGO, penulis dapat menyimpulkan bahwa Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia memiliki peranan yang penting dan membuahkan sebuah kemajuan dalam kasus ini. TPPO dan kejahatan siber merupakan sebuah kejahatan terorganisir transnasional yang kompleks, dapat melibatkan lebih dari dua negara, serta memerlukan banyak pihak untuk menangani kasus ini. Dengan jumlah korban yang banyak, tentu diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mengamankan dan memastikan bahwa WNI yang ditawarkan pekerjaan mendapatkan haknya. Dalam penanganan kasus ini, pihak yang terlibat dan memainkan peranan penting ialah Divhubinter POLRI dan KBRI Manila, dibantu dengan keterlibatan PNP dan PAOCC. TPPO yang berkedok lowongan pekerjaan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian lebih, hingga di masa mendatang kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Maka dari itu, perlu dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, organisasi, maupun masyarakat untuk mencapai keamanan bagi seluruh masyarakat di dunia.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia ialah dalam menghadapi kasus ini, TPPO yang berkedok sebagai lowongan pekerjaan adalah dengan kolaborasi dengan berbagai pihak baik di Indonesia, Filipina, maupun negara lain yang memiliki kasus serupa. Pemantauan pada iklan-iklan lowongan pekerjaan yang dinilai mencurigakan juga harus dilakukan, dibarengi dengan kampanye untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat perihal pencarian pekerjaan dan risiko yang akan dihadapi. Peningkatan kerangka hukum untuk mendukung para korban juga harus dilakukan agar tidak ada lagi korban yang merasa tidak dilindungi atau tertinggal.